

## SKRIPSI TERAPAN



### ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERTINGGAL (PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 63 TAHUN 2020) STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN AGGARAN 2018 -2022

Disusun oleh:

Muhammad Adrian

2004431042

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Program Studi Akuntansi Keuangan

Program Sarjana Terapan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2024

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



# SKRIPSI TERAPAN



## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERTINGGAL (PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 63 TAHUN 2020) STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN AGGARAN 2018 -2022

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi

Disusun oleh:  
Muhammad Adrian  
2004431042

Program Studi Akuntansi Keuangan

Program Sarjana Terapan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2024

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Muhammad Adrian

NIM : 2004431042

Tanda tangan :



Tanggal : 12 Agustus 2024

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Adrian  
NIM : 2004431042  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal (Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020) Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Yusep Friya P S, S.E.,M.Ak (  )

Anggota Penguji : Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA. (  )

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 12 Agustus 2024

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Wasisni, S.E., M.M.  
NIP.196404131990032002

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muhammad Adrian  
Nomor Induk Mahasiswa : 2004431042  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal (Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020) Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022.

Disetujui Oleh :  
Pembimbing

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA.  
NIP. 197202221999031003

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Ketua Program Studi  
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.  
NIP 196302031990031001

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal (Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020) Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Ngatino dan Ibu Ela Nurlela serta kakak Tira Eka Wati dan adik Fira Tri Ajirin yang senantiasa memberikan dorongan serta mendukung dan mendoakan saya.
2. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.Ak., CPIA selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan, waktu, dan motivasi dengan setulus hati kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Yusep Friya P S, S.E., Ak., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar maupun administrasi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Segenap jajaran pimpinan Politeknik Negeri Jakarta.
7. Syifa Kartika yang senantiasa memberikan do’a, dukungan dan semangat selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
8. Seluruh teman-teman program studi Akuntansi Keuangan Terapan Angkatan 2020 yang telah membantu selama perkuliahan serta memberikan semangat dan dukungan satu sama lain..
9. Serta berbagai pihak yang sudah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulisan, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya. Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan pada skripsi ini.



Depok, 12 Agustus 2024

Muhammad Adrian

NIM. 2004431042



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adrian  
NIM : 2004431042  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal (Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

Yang menyatakan

Muhammad Adrian



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal (Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020) Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022

Muhammad Adrian

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengukur kinerja keuangan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal menurut Perpres No. 63 Tahun 2020 yang diukur dari sudut pandang kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan. Pemerintah mengategorikan daerah tertinggal salah satunya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang diukur menggunakan (1) rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, (2) rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif, (3) rasio efisiensi dikategorikan cukup efisien, (4) rasio pertumbuhan memiliki tren fluktuatif, (5) rasio derajat desentralisasi dikategorikan kurang, dan (6) rasio ketergantungan dikategorikan sangat tinggi. Kabupaten Lombok Utara sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian Kabupaten Lombok Utara dikategorikan daerah tertinggal karena kemampuan keuangan daerahnya masih sangat rendah terutama pada pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Daerah Tertinggal, Realisasi APBD, Kinerja Keuangan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Analysis of Financial Performance in Underdeveloped Regions (Presidential Regulation No. 63 of 2020): A Case Study of the North Lombok Regency Government for the Fiscal Years 2018-2022*

Muhammad Adrian

*Financial Accounting Study Program*

**ABSTRACT**

*This study aims to assess and measure the financial performance of North Lombok Regency as a disadvantaged area according to Presidential Regulation No. 63 of 2020. The assessment is based on the perspectives of regional financial independence, effectiveness, efficiency, growth, degree of decentralization, and dependency. The government categorizes underdeveloped regions, one of which is determined by the region's financial capacity. This research employs a descriptive quantitative method using documentation techniques for data collection. The data used are secondary data in the form of the Regional Budget Realization Report of North Lombok Regency for the fiscal years 2018-2022. The results of the study indicate that the financial performance assessment of the North Lombok Regency Government shows: (1) the regional financial independence ratio is categorized as very low with an instructive relationship pattern, (2) the effectiveness ratio is categorized as fairly effective, (3) the efficiency ratio is categorized as fairly efficient, (4) the growth ratio shows a fluctuating trend, (5) the degree of decentralization ratio is categorized as lacking, and (6) the dependency ratio is categorized as very high. North Lombok Regency heavily depends on transfer funds from the central government. Consequently, North Lombok Regency is categorized as a disadvantaged area due to its very low financial capacity, particularly in terms of local revenue.*

*Keywords: Underdeveloped Region, APBD Realization, Financial Performance*



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Keuangan Daerah .....	8
2.2 Laporan Keuangan Daerah.....	8
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	9
2.4 Laporan Realisasi Anggaran .....	10
2.5 Pengukuran Kinerja.....	11
2.6 Metode Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
2.6.1 Rasio Kemandirian .....	12
2.6.2 Rasio Efektivitas.....	13
2.6.3 Rasio Efisiensi .....	14
2.6.4 Rasio Pertumbuhan.....	15
2.6.5 Rasio Derajat Desentralisasi.....	15
2.6.6 Rasio Ketergantungan .....	16

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.7 Penelitian Terdahulu .....	17
2.8 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Objek dan Subjek Penelitian .....	21
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	22
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	23
3.5 Metode Analisis Data.....	23
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	24
4.2 Data Penelitian .....	25
4.3 Deskripsi Hasil .....	27
4.3.1 Rasio Kemandirian .....	27
4.3.2 Rasio Efektivitas.....	29
4.3.3 Rasio Efisiensi .....	31
4.3.4 Rasio Pertumbuhan Belanja .....	33
4.3.5 Rasio Derajat Desentralisasi.....	35
4.3.6 Rasio Ketergantungan .....	36
BAB 5 PENUTUP .....	38
5.1 Kesimpulan .....	38
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....20



### © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Lombok Utara .....	2
Tabel 2. 1 Kemampuan Daerah, Rasio Kemandirian, dan Pola Hubungan.....	13
Tabel 2. 2 Kriteria pengukuran efektivitas .....	14
Tabel 2. 3 Kriteria pengukuran efisiensi.....	14
Tabel 2. 4 Kriteria Derajat Desentralisasi.....	16
Tabel 2. 5 Kriteria Ketergantungan .....	16
Tabel 4. 1 Daftar Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lombok Utara 2018-2022 .....	25
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian.....	28
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas .....	30
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi .....	32
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja.....	34
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi .....	35
Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan.....	37

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 .....	43
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 .....	45
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 .....	47
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 .....	49
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 .....	51



### © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek yang penting dan perlu diketahui masyarakat yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat dengan memiliki keingintahuan tentang pengelolaan keuangan daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk dilaksakannya otonomi daerah. Menurut Wardani & Saleh, (2020) Otonomi daerah adalah otoritas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di wilayah mereka. Otonomi daerah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan otonomi daerah, diharapkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan, serta terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Penerapan otonomi daerah membutuhkan persiapan beberapa aspek pendukung di setiap daerah, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, dan keuangan. Penerapan otonomi daerah mendukung pemerintah daerah memahami semua isu-isu lokal dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan kesejahteraan secara komprehensif bagi masyarakat. Menurut (Fadhilah et al., 2022) Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan lokal atau pendapatan asli daerah, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal.

Kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran berperan penting dalam memantapkan, mendistribusikan, menyediakan sumber daya publik, merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kinerja organisasi. Anggaran ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mengelola anggaran dan melaksanakan otonomi daerah, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis kinerja keuangan daerah melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah daerah. Menurut (Arnianto & Sati, 2020) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang memberikan gambaran lengkap mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Dalam laporan ini membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya selama satu periode pelaporan.

Penelitian ini mengambil objek pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Sebagai bagian dari tata kelola, pengelolaan keuangan pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, mendukung pembangunan, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal. Namun Lombok Utara masuk kedalam salah satu daerah tertinggal yang diatur pada Peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam salah satu daerah tertinggal dikarekan dianggap kurang mencapai kriteria yang ditetapkan seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, karakteristik daerah, perekonomian masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan aksesibilitas.

Kabupaten Lombok Utara saat ini menjadi satu-satunya kabupaten dengan status daerah tertinggal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuh dari delapan kabupaten lainnya telah keluar dari status daerah tertinggal, di antaranya yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan realisasi belanja diketahui pada dua tahun terakhir sebelum dikeluarkan Perpres Nomor 63 tahun 2020 daya serap anggaran tersebut cenderung rendah. Sebagai gambaran hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi belanja Kabupaten Lombok Utara tahun 2018-2019 dibawah ini:

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Lombok Utara

Tahun	Belanja Daerah		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2018	868.764.931.160,78	785.367.155.045,80	90,40%
2019	1.048.293.103.387,60	961.663.785.112,80	91,74%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara 2018-2019



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa masih ada beberapa realisasi belanja yang kurang dari 95% yaitu pada tahun 2018 sebesar 90,40%, dan pada 2019 sebesar 91,74%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa persentase penyerapan anggaran dianggap optimal yaitu minimal pada 95%. Maka dari gambaran tersebut terlihat bahwa cenderung rendah dalam memanfaatkan aktivitas belanja mereka karena masih terdapat dibawah 95%.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Drastiana & Himmati, 2021) yang membahas analisis rasio keuangan sebagai alat penilaian kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2020 menjelaskan bahwa kemandirian keuangan pada pemerintahan Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng masuk dalam kategori rendah sekali, rasio efektivitas masuk dalam kategori tidak efektif, rasio efisiensi masuk kategori sangat efisien, dan rasio pertumbuhan cenderung fluktuatif. Kemudian menurut Amal & Wibowo, (2022) mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa rasio kemandirian Provinsi DKI Jakarta sangat tinggi, rasio efektivitas masuk dalam kategori efektif, rasio efisiensi masuk dalam kategori tidak efisien, dan rasio pertumbuhan mengalami penurunan. Lalu dalam penelitian Aryanti & Nugroho, (2022) mengenai penilaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021 menjelaskan rasio kemandirian masuk dalam kategori sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas masuk dalam kategori efektif, rasio efisiensi masuk dalam kategori kurang efisien, rasio pertumbuhan dibebberapa tahun positif dan satu tahun negatif, dan rasio derajat desentralisasi masuk dalam kategori cukup. Sedangkan dalam penelitian Wokal, (2023) mengenai penilaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018-2021 menjelaskan rasio kemandirian masuk dalam kategori rendah, serta mempunyai pola hubungan konsultatif, rasio efektivitas masuk dalam kategori cukup efektif, rasio efisiensi masuk dalam kategori tidak efisien, rasio pertumbuhan memiliki tren fluktuatif, dan rasio derajat desentralisasi masuk dalam kategori sedang. Penelitian dari Tahun K, (2022) mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa Rasio Derajat desentralisasi fiskal dikategorikan sangat rendah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

rendah sekali dan pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas Pendapatan dikategorikan tidak efektif, Rasio Efisiensi Pendapatan dikategorikan tidak efisien. Lalu penelitian dari Naha, (2023) mengenai analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2018-2020 menyatakan rasio derajat desentralisasi fiskal sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah, rasio efektivitas dikategorikan kurang efektif, rasio efisiensi masuk kategori efisien. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait PerPres Nomor 63 tahun 2020 pada suatu Pemerintah Provinsi, adapun judul sebagai berikut **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal (Peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2020) Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022”**

### 1.2. Rumusan Masalah

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 mengklasifikasikan daerah tertinggal berdasarkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, karakteristik daerah, perekonomian masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan aksesibilitas. Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam salah satu daerah tertinggal dikarenakan dianggap kurang mencapai kriteria tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus meninjau secara berkala, mengevaluasi kinerja keuangan untuk mengetahui kendala yang ada. Laporan mengenai kinerja keuangan pemerintah akan disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang akan direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memverifikasi bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pengevaluasian tersebut dilakukan sebagai dasar perencanaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar Kabupaten Lombok Utara keluar dari daerah tertinggal menurut PerPres Nomor 63 tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Naha, (2023) yang membahas analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2018-2020 menyatakan rasio derajat desentralisasi sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah, rasio efektivitas dikategorikan kurang efektif, rasio efisiensi masuk kategori efisien. Sedangkan menurut Tahun, (2022) mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa Rasio Derajat desentralisasi dikategorikan sangat rendah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan rendah sekali dan pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas Pendapatan dikategorikan tidak efektif, Rasio Efisiensi Pendapatan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dikategorikan tidak efisien. Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan termasuk daerah tertinggal menurut PerPres Nomor 63 Tahun 2020, dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil yang cukup berbeda, hanya dua dari lima rasio yang memiliki hasil yang sama, sehingga peneliti ingin menganalisis kabupaten lain yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal menurut PerPres Nomor 63 tahun 2020 yaitu pada Kabupaten Lombok Utara.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbulah pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal tahun anggaran 2018-2022 dari sudut pandang kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah pusat?
2. Bagaimana hasil pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Utara dari tahun anggaran 2018 hingga 2022 dari sudut pandang kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah pusat?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara selama periode 2018-2022 dari sudut pandang kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah pusat.
2. Mendeskripsikan hasil pengukuran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara selama periode 2018-2022 dari sudut pandang kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah pusat.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca tentang penilaian kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal menurut PerPres RI No. 63 tahun 2020, serta referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penilaian kinerja suatu daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi refensi yang berharga bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Lombok Utara serta otoritas daerah lainnya terkait dengan penilaian kinerja suatu daerah.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang dan perumusan masalah yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Di dalamnya, terdapat uraian mengenai pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan, memberikan gambaran tentang struktur dan alur dari keseluruhan isi penelitian.

#### BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfokus pada penjelasan rinci mengenai landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti memaparkan berbagai teori dan temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, memberikan konteks dan dasar ilmiah bagi analisis yang akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga mencakup kerangka pemikiran yang menjelaskan alur berpikir dan langkah-langkah logis yang diikuti dalam penulisan ini, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana penelitian ini disusun dan dikembangkan.

#### BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, mencakup berbagai aspek penting. Di dalamnya, dijelaskan mengenai objek penelitian yang menjadi fokus utama, metode yang digunakan untuk pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Selain itu, bab ini juga memaparkan teknik analisis data yang akan diterapkan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

#### BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas gambaran umum mengenai Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai objek penelitian, serta secara rinci menguraikan hasil penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk tahun anggaran 2018-2022

#### BAB 5: PENUTUP

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penilaian dan pengukuran kinerja keuangan daerah tertinggal Kabupaten Lombok Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian pada Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2018-2022 dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yang memiliki rata-rata rasio kemandirian 16,42%. Rasio efektivitas Kabupaten Lombok Utara tahun 2018-2022 memiliki rata-rata persentase 84,80% dikategorikan cukup efektif. Rasio efisiensi pada Kabupaten Lombok Utara pada tahun anggaran 2018-2022 yaitu dengan rata-rata 87,11% dapat dikategorikan cukup efisien. Realisasi belanja Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2018-2022 memiliki rasio pertumbuhan belanja yang fluktuatif dengan rata-rata 0,27% tren positif. Rasio derajat desentralisasi dari tahun 2018-2022 Kabupaten Lombok Utara dikategorikan kurang dengan rata-rata 13,35%. Rasio ketergantungan dari tahun 2018-2022 Kabupaten Lombok Utara dikategorikan sangat tinggi dengan rata-rata 81,89%.
2. Secara umum dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2018-2022 kemandirian Kabupaten Lombok Utara masih sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, dan belum mampu meningkatkan kualitas otonomi daerah serta belum dapat membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Dari sisi efektivitas pada tahun 2018 dan 2020 dikategorikan efektif, pada tahun 2018 hampir memenuhi target hanya kurang pada Pendapatan pajak daerah 89,05%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan daerah 84,15%, pendapatan retribusi daerah 74,04%, lalu pada 2020 dikarenakan terjadi penurunan target PAD sebesar 41,48% dari tahun sebelumnya dikarenakan *COVID-19*. Adapun dari sisi efisiensi pada tahun 2019 dikategorikan kurang efisien dikarenakan belanja yang masif pada belanja gedung dan bangunan. Untuk pertumbuhan belanja memiliki tren positif pada tahun 2019 dan 2022, pada tahun 2019 dikarenakan mendapat kenaikan dana perimbangan dari pusat untuk pembangunan pasca gempa dan pada tahun 2022 dikarenakan mulai kembali pulih dari wabah *COVID-19*, sehingga realisasi belanja telah terealisasi diatas 95%. Dari sisi derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara masih kurang optimal dalam menggali PAD untuk menunjang pendapatan daerah. Sementara itu

ketergantungan Kabupaten Lombok Utara masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan peneliti adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara memiliki peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada, khususnya di sektor pariwisata yang belum dikelola secara optimal. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung objek-objek wisata seperti aksesibilitas, *rest area*, *food court* dan sebagainya, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem administrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pembayaran. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah juga menjadi faktor krusial. Pemerintah dapat melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (BIMTEK) keuangan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan daerah. Serta, untuk memotivasi perangkat daerah dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat menerapkan sistem penghargaan bagi mereka yang berhasil mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Penghargaan ini tidak hanya akan meningkatkan semangat kerja, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lombok Utara. Dengan perbaikan pada hal-hal tersebut, diharapkan Kabupaten Lombok Utara tidak lagi dikategorikan sebagai daerah tertinggal.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan observasi langsung ke pemerintah daerah dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Langkah ini akan memungkinkan peneliti mengkaji lebih mendalam tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta proses penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci dan valid mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama di daerah tertinggal.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. (2013). *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta: Politeknik Kesehatan Surakarta.
- Alvaro, R. (2022). PENGARUH PAD, DAU, DAK, DBH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*. <https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/132>
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) ...* <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1723>
- Arnianto, D. D., & Sati, A. (2020). Pengaruh Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang. *Pareso Jurnal*. <http://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/69>
- Aryanti, A., & Nugroho, H. (2022). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021. *Seminar Nasional Akuntansi Dan ...* <http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5789>
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research methods for business: A skill building approach*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ikI6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=sekaran&ots=tgIVo9FBwh&sig=BlPgA1eJTv9mPsEN-hjXgWygore>
- BPS. (2023). *Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Lombok Utara.
- Dartiningsih, B. E. (2016). Gambaran Umum Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian. *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi*. <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOM-2016.pdf#page=138>
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. ... *Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis ...* <https://www.academia.edu/download/75789817/1693.pdf>
- Fadhilah, A. N., TOHARI, A., & ZAMAN, B. (2022). *ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018-2021*. repository.unpkediri.ac.id. <http://repository.unpkediri.ac.id/7318/>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Haya, A. V, Davenport, T. H., & Prusak, L. (2019). *Klasifikasi Jenis Data Penelitian*. academia.edu.  
[https://www.academia.edu/download/60669432/KLASIFIKASI\\_JENIS\\_DATA\\_PENELITIAN.pdf](https://www.academia.edu/download/60669432/KLASIFIKASI_JENIS_DATA_PENELITIAN.pdf)
- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi ....* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/38525>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Naha, L. R. (2023). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2020*. UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & ... (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. ... *Ekonomi Dan Keuangan ....* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35097>
- Sijabat, M. Y. , S. C. , & W. A. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2)(236–242).
- Sugiyono, P. D. (2016). *Statistika Untuk Penelitian (ke-27)*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*. [digilib.uns.ac.id](https://digilib.uns.ac.id).  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/16992>
- Susanto, H. (2014). Analisis perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Repository. Ut. Ac. Id. Https://Doi. Org/10.1017 ....*  
<https://repository.ut.ac.id/1430/1/Artikel%20Hery%20Susanto.pdf>
- Tahun, K. T. (2022). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. [skripsi.undana.ac.id](http://skripsi.undana.ac.id).  
[http://skripsi.undana.ac.id/?p=show\\_detail&id=10231](http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=10231)

- Wardani, S., & Saleh, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2018. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*. <http://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/2543>
- Wokal, M. O. U. (2023). *PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018-2021*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & ... (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur ....* <http://ejournal.up45.ac.id/index.php/maksipreneur/article/view/893>
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=yusuf+metode+penelitian&ots=Jy9pNiYB8h&sig=dNYOBqF9E\\_WU7efkniko4K7zjIU](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=yusuf+metode+penelitian&ots=Jy9pNiYB8h&sig=dNYOBqF9E_WU7efkniko4K7zjIU)

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

## Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1						
2	<b>PENDAPATAN</b>					
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
4	Pendapatan Pajak Daerah	L.1.1.1	77.277.488.994,15	68.816.145.279,00	89,05	92.645.659.869,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	L.1.1.2	11.971.849.240,60	8.864.449.689,00	74,04	9.305.407.983,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	L.1.1.3	4.506.732.049,44	3.793.981.094,00	84,15	5.073.723.177,00
7	Lain-lain PAD yang sah	L.1.1.4	51.727.528.041,40	49.600.362.566,97	95,89	43.924.782.078,69
8	Jumlah I Jumlah Pendapatan Asli Daerah		145.483.598.325,59	131.074.968.619,97	90,09	160.949.663.167,69
9						
10	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
11	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
12	Dana Bagi Hasil Pajak	L.1.1.5	19.475.775.000,00	17.993.965.219,00	92,39	19.446.429.997,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	L.1.1.6	22.827.920.000,00	25.319.886.838,00	110,92	38.534.889.313,00
14	Dana Alokasi Umum	L.1.1.7	392.932.943.000,00	392.932.943.000,00	100,00	392.932.943.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	L.1.1.8	175.229.491.000,00	167.347.499.619,00	95,50	158.431.700.473,00
16	Jumlah II Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		610.466.129.000,00	603.594.314.676,00	98,87	609.345.962.783,00
17						
18	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
19	Dana Otonomi Khusus	L.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	L.1.1.10	0,00	0,00	0,00	86.040.117.500,00
21	Jumlah III Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00	100,00	86.040.117.500,00
22						
23	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN</b>					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	L.1.1.11	38.182.414.681,00	37.565.886.000,00	98,39	37.304.501.054,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	L.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	L.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah IV Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan		38.182.414.681,00	37.565.886.000,00	98,39	37.304.501.054,00
28						
29	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA</b>					
30	Bantuan Keuangan dari Propinsi	L.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi	L.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi	L.1.1.16	1.500.000.000,00	20.997.811.400,00	139,98	0,00
33	Jumlah V Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya		1.500.000.000,00	20.997.811.400,00	139,98	0,00
34	Jumlah IV (II+III+IV+V) Jumlah Pendapatan Transfer		650.148.543.681,00	612.168.612.076,09	92,78	732.690.561.337,00
35						
36	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
37	Pendapatan Hibah	L.1.1.17	27.234.000.000,00	27.890.200.000,00	102,41	27.311.443.000,00
38	Pendapatan Dana Darurat	L.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pendapatan Lainnya	L.1.1.19	85.801.521.000,00	85.037.342.000,00	99,11	0,00
40	Jumlah V Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		113.035.521.000,00	112.927.542.000,00	99,90	27.311.443.000,00
41	Total Pendapatan (I+II+III+IV+V) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)		908.669.663.006,59	936.160.522.694,97	93,72	910.951.577.444,69
42						
43	<b>BELANJA</b>					
44	<b>BELANJA OPERASI</b>					
45	Belanja Pegawai	L.1.1.20	259.455.594.031,08	238.414.402.714,00	91,89	229.450.347.447,00
46	Belanja Barang dan Jasa	L.1.1.21	363.174.967.806,70	327.515.627.654,00	90,18	298.053.276.896,00
47	Bunga	L.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Subsidi	L.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Hibah	L.1.1.24	9.288.900.000,00	8.545.480.225,00	92,00	6.939.777.256,00
50	Bantuan Sosial	L.1.1.25	9.251.000.000,00	8.460.000.000,00	91,45	5.120.000.000,00
51	Bantuan Keuangan	L.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah I Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43)		641.170.481.837,78	582.935.610.593,00	91,02	529.563.401.599,00
53						
54	<b>BELANJA MODAL</b>					
55	Belanja Tanah	L.1.1.27	4.755.911.000,00	4.522.758.000,00	95,10	5.819.158.660,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	L.1.1.28	51.449.197.659,00	39.873.555.246,80	77,50	41.480.593.504,58
57	Belanja Gedung dan Bangunan	L.1.1.29	39.560.892.985,00	27.030.411.896,00	68,33	61.061.608.615,00
58	Belanja Jalan, Inggas dan Jaringan	L.1.1.30	129.477.665.099,00	125.439.389.089,00	96,88	160.472.777.387,00
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	L.1.1.31	2.100.783.000,00	5.565.532.231,00	264,93	2.887.863.000,00
60	Belanja Aset Lainnya	L.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah II Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)		227.344.449.323,00	202.431.644.482,80	89,04	271.701.021.216,58

**Hak Cipta :****© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
62	BELANJA TAK TERDUGA					
63	Belanja Tak Terduga	L.1.1.33	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Jumlah II Jumlah Belanja Tak Terduga (64)		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
65						
66						
67	TRANSFER					
68	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/DESA					
69	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	L.1.1.34	14.158.732.966,57	14.158.732.768,00	100,00	10.022.826.296,00
70	Bagi Hasil Restitusi ke Kab/Kota/Desa	L.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota/Desa	L.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Bantuan Keuangan ke Desa (ADD dan DD)	L.1.1.37	93.667.184.800,00	93.240.132.498,00	99,54	82.799.881.050,00
73	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	L.1.1.38	560.866.635,00	560.866.635,00	100,00	560.866.635,00
74	Jumlah IM JUMLAH TRANSFER (63 + 68)		108.386.784.401,57	107.959.731.501,00	99,61	93.383.372.960,00
75	Total Belanja (I+II+III+IV) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (56 + 69)		977.161.716.562,35	893.326.866.946,80	91,42	934.847.786.805,58
76	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)		(66.482.052.556)	12.833.636.748,17	-18,74	6.303.781.639,11
77						
78	PEMBIAYAAN					
79	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
80	Penggunaan SILPA	L.1.1.39	78.482.052.555,76	78.482.052.555,76	100,00	80.178.270.916,65
81	Pencairan Dana Cadangan	L.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	L.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	L.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	L.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	L.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	L.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	L.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	L.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	L.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	L.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	L.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Penerimaan Kembali Investasi Proyek Pembangunan	L.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Penerimaan Kembali Investasi SUN dan SBI	L.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Penerimaan Kembali Pinjaman anguran Berjangka	L.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	L.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja	L.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Penerimaan Piutang Daerah	L.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Jumlah I Jumlah Penerimaan (75 sid 76)		78.482.052.555,76	78.482.052.555,76	100,00	80.178.270.916,65
99						
100	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
101	Pembentukan Dana Cadangan	L.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	L.1.1.58	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	8.000.000.000,00
103	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	L.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	L.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuang	L.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuang	L.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	L.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	L.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	L.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	L.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	L.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investasi SUN dan SBI	L.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Investasi Proyek Pembangunan	L.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Pinjaman anguran Berjangka	L.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Penyaluran Dana Bergulir	L.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja	L.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Jumlah II Jumlah Pengeluaran (80)		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	8.000.000.000,00
118	PEMBIAYAAN NETTO (77 - 81)		68.482.052.555,76	68.482.052.555,76	100,00	72.178.270.916,65
119						
120	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	81.315.686.303,80		78.482.052.555,76



## Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAHTEK DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1						
2	<b>PENDAPATAN</b>					
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
4	Pendapatan Pajak Daerah	L.1.1.1	115.955.582.300,07	83.896.563.720,00	72,35	68.816.145.279,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	L.1.1.2	9.931.798.000,00	3.581.682.950,00	36,06	8.894.449.699,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dialihkan	L.1.1.3	4.508.732.049,44	3.860.552.288,00	81,19	3.793.981.094,00
7	Lain-lain PAD yang sah	L.1.1.4	50.532.452.447,16	55.632.863.716,75	100,19	49.600.392.556,97
8	<b>Jumlah I Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>180.928.564.796,67</b>	<b>146.971.642.715,75</b>	<b>78,94</b>	<b>131.074.966.610,97</b>
9						
10	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
11	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERMBANGUNAN</b>					
12	Dana Bagi Hasil Pajak	L.1.1.5	17.590.733.000,00	15.174.210.800,00	86,28	17.993.985.219,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	L.1.1.6	19.859.237.000,00	13.861.398.200,00	69,49	25.319.886.838,00
14	Dana Alokasi Umum	L.1.1.7	408.751.699.000,00	408.751.699.000,00	100,00	392.932.943.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	L.1.1.8	310.343.282.569,00	291.724.203.427,00	94,00	167.347.499.619,00
16	<b>Jumlah II Jumlah Pendapatan Transfer Dana</b>		<b>706.344.961.569,00</b>	<b>729.311.511.427,00</b>	<b>96,43</b>	<b>893.594.314.676,00</b>
17						
18	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
19	Dana Otonomi Khusus	L.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Perimbangan	L.1.1.10	94.125.826.000,00	94.125.826.000,00	100,00	0,00
21	<b>Jumlah III Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>94.125.826.000,00</b>	<b>94.125.826.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
22						
23	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN</b>					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	L.1.1.11	41.488.565.072,00	50.992.699.291,00	122,97	37.565.886.000,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	L.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	L.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Jumlah IV Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan</b>		<b>41.488.565.072,00</b>	<b>50.992.699.291,00</b>	<b>122,97</b>	<b>37.565.886.000,00</b>
28						
29	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA</b>					
30	Bantuan Keuangan dari Propinsi	L.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi	L.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi	L.1.1.16	0,00	0,00	0,00	20.997.811.460,00
33	<b>Jumlah V Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.997.811.460,00</b>
34	<b>Jumlah IV (II+III+V) Jumlah Pendapatan</b>		<b>891.939.342.641,00</b>	<b>874.439.634.718,00</b>	<b>98,04</b>	<b>962.156.912.676,97</b>
35						
36	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
37	Pendapatan Hibah	L.1.1.17	27.234.000.000,00	27.934.040.000,00	102,57	27.890.200.000,00
38	Pendapatan Dana Darurat	L.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pendapatan Lainnya	L.1.1.19	0,00	0,00	0,00	95.037.342.000,00
40	<b>Jumlah V Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>27.234.000.000,00</b>	<b>27.934.040.000,00</b>	<b>102,57</b>	<b>112.927.542.000,00</b>
41	<b>Total Pendapatan (I+II+V) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 36 + 32)</b>		<b>1.106.101.897.437,67</b>	<b>1.049.136.717.437,76</b>	<b>94,84</b>	<b>906.160.522.694,97</b>
42						
43	<b>BELANJA</b>					
44	<b>BELANJA OPERASI</b>					
45	Belanja Pegawai	L.1.1.20	379.858.534.163,99	258.290.252.824,00	68,05	238.414.402.714,00
46	Belanja Barang dan Jasa	L.1.1.21	381.263.889.069,34	352.416.619.021,40	92,43	327.515.627.654,00
47	Bunga	L.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Subsidi	L.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Hibah	L.1.1.24	11.601.300.000,00	9.246.891.216,00	79,70	8.545.480.225,00
50	Bantuan Sosial	L.1.1.25	6.460.000.000,00	5.476.000.000,00	84,77	8.490.000.000,00
51	Bantuan Keuangan	L.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<b>Jumlah I Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 43)</b>		<b>669.362.923.253,34</b>	<b>625.429.963.061,40</b>	<b>93,44</b>	<b>582.935.510.593,00</b>
53						
54	<b>BELANJA MODAL</b>					
55	Belanja Tanah	L.1.1.27	16.256.775.000,00	13.358.001.788,00	82,17	4.522.756.000,00
56	Belanja Perawatan dan Mesin	L.1.1.28	105.727.045.114,93	91.770.619.338,26	86,80	39.873.555.246,80
57	Belanja Gedung dan Bangunan	L.1.1.29	129.736.777.184,00	111.315.217.861,27	85,80	27.090.411.666,00
58	Belanja Jalan, Hidrol dan Jaringan	L.1.1.30	122.889.917.836,33	116.898.905.485,87	94,98	123.430.389.000,00
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	L.1.1.31	3.119.665.000,00	3.991.477.800,00	128,00	5.565.532.231,00
60	Belanja Aset Lainnya	L.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<b>Jumlah II Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)</b>		<b>377.739.160.135,26</b>	<b>336.234.222.961,40</b>	<b>89,01</b>	<b>202.431.844.462,80</b>
62						
63	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
64	Belanja Tak Terduga	L.1.1.33	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>Jumlah III Jumlah Belanja Tak Terduga (56)</b>		<b>1.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66						
67	<b>TRANSFER</b>					
68	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA/DESA</b>					
69	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	L.1.1.34	12.588.737.039,00	12.588.736.830,00	100,00	14.158.732.768,00
70	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	L.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota/Desa	L.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Bantuan Keuangan ke Desa (ADD dan DD)	L.1.1.37	112.974.880.500,00	112.824.737.500,00	99,87	83.240.132.498,00
73	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	L.1.1.38	560.884.815,00	560.886.635,00	100,00	560.886.635,00
74	<b>Jumlah III JUMLAH TRANSFER (63 + 68)</b>		<b>126.124.482.354,00</b>	<b>125.974.349.965,00</b>	<b>99,89</b>	<b>167.959.751.901,66</b>
75	<b>Total Belanja (I+II+III) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 68)</b>		<b>1.174.417.695.741,80</b>	<b>1.087.638.126.077,80</b>	<b>92,81</b>	<b>893.326.886.946,80</b>
76	<b>SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja) SURPLUS/DEFISIT (33 - 76)</b>		<b>(89.315.888.303,93)</b>	<b>(38.602.408.640,04)</b>	<b>55,55</b>	<b>12.833.636.746,17</b>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbaharui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
77						
78	<b>PEMBAYAAAN</b>					
79	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
80	Penggunaan SLPA	L.1.1.38	81.315.688.303,93	81.292.593.181,05	99,97	78.482.052.555,76
81	Pencairan Dana Cadangan	L.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Hasil Perjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	L.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	L.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	L.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	L.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	L.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	L.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	L.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	L.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	L.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	L.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Penerimaan Kembali Investasi Proyek Pembangunan	L.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Penerimaan Kembali Investasi SUN dan SDB	L.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka	L.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	L.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)Utang Belanja	L.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Penerimaan Pinang Daerah	L.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>Jumlah I Jumlah Penerimaan (75 s.d 76)</b>		<b>81.315.688.303,93</b>	<b>81.292.593.181,05</b>	<b>99,97</b>	<b>78.482.052.555,76</b>
99						
100	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
101	Pembentukan Dana Cadangan	L.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	L.1.1.58	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00	58,33	10.000.000.000,00
103	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	L.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	L.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	L.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	L.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	L.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	L.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	L.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	L.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	L.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investasi SUN dan SDB	L.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Investasi Proyek Pembangunan	L.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Pinjaman angsuran Berjangka	L.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Penyaluran Dana Bergulir	L.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)Utang Belanja	L.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00
117	<b>Jumlah II Jumlah Pengeluaran (88)</b>		<b>12.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>58,33</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
118	<b>PEMBAYAAAN NETTO (77 - 81)</b>		<b>69.315.688.303,93</b>	<b>74.292.593.181,05</b>	<b>107,18</b>	<b>68.482.052.555,76</b>
119						
120	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>35.793.184.541,00</b>		<b>81.315.688.303,93</b>



# JAKARTA

## Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	SALDO 2020	%	REALISASI 2019
1						
2	PENDAPATAN					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4	Pendapatan Pajak Daerah	L.1.1.1	41.726.069.606,93	36.083.644.392,00	86,48	83.896.563.720,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	L.1.1.2	4.946.364.599,20	3.837.192.488,00	77,58	3.581.662.995,00
6	Pendapatan Hasil Pengkelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	L.1.1.3	4.700.000.000,00	4.780.025.305,00	101,70	3.680.552.288,00
7	Lain-lain PAD yang sah	L.1.1.4	57.434.772.540,50	58.749.244.851,12	102,29	50.632.063.716,75
8	Jumlah I Jumlah Pendapatan Asli Daerah		108.807.206.748,63	103.460.107.036,12	95,08	148.771.642.718,75
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER					
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan					
12	Dana Bagi Hasil Pajak	L.1.1.5	22.218.615.976,00	19.349.699.745,00	87,09	15.174.210.800,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	L.1.1.6	9.387.123.156,00	13.165.724.748,00	140,25	13.661.398.200,00
14	Dana Alokasi Umum	L.1.1.7	378.529.590.000,00	376.031.612.000,00	99,34	408.751.699.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	L.1.1.8	153.603.378.000,00	146.219.221.023,00	95,19	291.724.203.427,00
16	Jumlah II Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		563.738.707.132,00	554.766.257.516,00	98,41	728.311.511.427,00
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
19	Dana Otonomi Khusus	L.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	L.1.1.10	116.813.335.000,00	116.813.335.000,00	100,00	94.125.825.000,00
21	Jumlah III Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		116.813.335.000,00	116.813.335.000,00	100,00	94.125.825.000,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN					
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	L.1.1.11	43.610.502.050,00	45.048.373.083,00	103,30	50.992.898.291,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	L.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	L.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah IV Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan		43.610.502.050,00	45.048.373.083,00	103,30	50.992.898.291,00
28						
29	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA					
30	Bantuan Keuangan dari Propinsi	L.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi	L.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi	L.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah V Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah IV (II+III+IV+V) Jumlah Pendapatan Transfer		724.162.544.182,00	716.627.965.599,00	98,96	874.430.034.718,00
35						
36	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
37	Pendapatan Hibah	L.1.1.17	44.130.430.000,00	39.798.837.971,00	90,18	27.934.040.000,00
38	Pendapatan Dana Darurat	L.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pendapatan Lainnya	L.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Jumlah VI Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		44.130.430.000,00	39.798.837.971,00	90,18	27.934.040.000,00
41	Total Pendapatan (I+II+III+IV+V+VI) JUMLAH PENDAPATAN (8 + 34 + 40)		877.160.180.928,63	859.876.910.606,12	98,04	1.048.135.717.437,75
42						
43	BELANJA					
44	BELANJA OPERASI					
45	Belanja Pegawai	L.1.1.20	259.928.348.093,18	251.426.351.894,00	96,73	256.290.252.824,00
46	Belanja Barang dan Jasa	L.1.1.21	304.905.230.976,30	297.220.068.943,80	97,48	352.416.619.021,40
47	Bunga	L.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Subsidi	L.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Hibah	L.1.1.24	41.161.406.000,00	37.399.182.782,00	90,80	9.246.691.216,00
50	Bantuan Sosial	L.1.1.25	650.000.000,00	436.700.000,00	67,18	5.476.000.000,00
51	Bantuan Keuangan	L.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah I Jumlah Belanja Operasi (45 s/d 51)		606.644.983.069,48	586.478.303.619,80	96,68	625.420.583.061,40
53						
54	BELANJA MODAL					
55	Belanja Tanah	L.1.1.27	272.716.000,00	220.970.397,00	81,03	13.358.001.766,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	L.1.1.28	50.135.176.584,00	40.494.398.562,00	80,77	91.770.619.338,26
57	Belanja Gedung dan Bangunan	L.1.1.29	43.396.896.269,54	38.509.654.196,00	88,95	111.315.217.861,27
58	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	L.1.1.30	46.142.845.770,64	45.323.460.059,00	98,22	116.698.905.485,87
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	L.1.1.31	3.310.373.000,00	3.295.819.512,00	99,56	3.091.477.600,00
60	Belanja Aset Lainnya	L.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah II Jumlah Belanja Modal (55 s/d 60)		143.268.007.624,18	127.834.302.726,00	89,30	338.234.222.051,40
62						
63	BELANJA TAK TERDUGA					
64	Belanja Tak Terduga	L.1.1.33	35.987.246.599,99	33.342.809.708,00	92,65	0,00
65	Jumlah III Jumlah Belanja Tak Terduga (64)		35.987.246.599,99	33.342.809.708,00	92,65	0,00
66	Total Belanja (I+II+III) JUMLAH BELANJA (52 + 61 + 65)		785.890.237.293,63	747.755.416.053,80	95,15	961.663.785.112,80

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

68	TRANSFER					
69	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA/DESA					
70	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	5.1.1.34	7.310.539.051,00	7.310.539.051,00	100,00	12.508.736.830,00
71	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	5.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota/Desa	5.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Bantuan Keuangan ke Desa (ADD dan DD)	5.1.1.37	114.129.076.000,00	114.099.769.600,00	99,97	112.804.737.500,00
74	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	5.1.1.38	550.513.125,00	550.512.205,00	99,99	560.566.635,00
75	JUMLAH TRANSFER (68 s/d 74)		122.009.128.176,00	121.960.820.856,00	99,97	125.974.346.965,00
76	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (66 + 75)		807.893.365.469,63	808.716.236.909,80	95,86	1.087.636.126.077,80
77	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja) SURPLUS/DEFISIT (41 - 66)		(30.796.184.541,80)	(8.838.326.303,66)	31,86	(38.602.468.640,05)
78						
79	PEMBIAYAAN					
80	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
81	Pergunaan SILPA	5.1.1.39	35.790.184.541,00	35.790.184.541,00	100,00	81.292.593.181,05
82	Pencarian Dana Cadangan	5.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Penerimaan Kembali Investasi Proyek Pembangunan	5.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Penerimaan Kembali Investasi SUN dan SBI	5.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka	5.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)Utang Belanja	5.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Jumlah I Jumlah Penerimaan (81 s/d 98)		35.790.184.541,00	35.790.184.541,00	100,00	81.292.593.181,05
100						
101	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
102	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.1.58	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Investasi SUN dan SBI	5.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investasi Proyek Pembangunan	5.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Pinjaman angsuran Berjangka	5.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Penyisutan Dana Bergulir	5.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)Utang Belanja	5.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Jumlah II Jumlah Pengeluaran (102 s/d 117)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
119	PEMBIAYAAN NETTO (99 - 118)		30.790.184.541,00	30.790.184.541,00	100,00	74.292.593.181,05
120						
121	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	20.950.858.237,32		25.790.184.541,00



## Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1						
2	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	39.482.282.800,00	25.512.304.152,00	64,62	36.083.644.392,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.561.135.100,00	3.483.522.178,00	110,20	3.837.192.488,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.406.401.527,00	3.459.548.137,00	101,56	4.780.025.305,00
7	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	75.786.343.970,00	54.940.349.810,85	72,49	58.740.244.851,12
8	Jumlah I Jumlah Pendapatan Asli Daerah		121.836.163.397,00	87.395.724.277,85	71,73	103.450.107.036,12
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	17.864.022.000,00	21.810.399.515,00	122,09	19.349.899.745,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	12.681.145.000,00	21.133.103.078,00	166,65	13.165.724.748,00
14	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	373.720.523.000,00	373.720.523.000,00	100,00	376.031.612.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	170.469.503.000,00	153.840.819.893,00	90,25	146.219.221.023,00
16	Jumlah II Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		574.735.193.000,00	570.504.846.486,00	99,26	554.766.257.516,00
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
19	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.2	117.398.745.000,00	117.260.115.100,00	99,88	116.813.335.000,00
21	Jumlah III Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		117.398.745.000,00	117.260.115.100,00	99,88	116.813.335.000,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.1.2.3				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.2.3.1	46.082.275.249,00	47.146.491.879,00	102,31	45.048.373.083,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah IV Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan		46.082.275.249,00	47.146.491.879,00	102,31	45.048.373.083,00
28						
29	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA	5.1.1.2.4				
30	Bantuan Keuangan dari Propinsi	5.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi	5.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi	5.1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah V Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah VI (II+III+IV+V) Jumlah Pendapatan Transfer		738.216.213.249,00	734.911.452.465,00	99,55	716.627.965.599,00
35						
36	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
37	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	27.934.040.000,00	30.856.318.000,00	110,46	39.796.837.971,00
38	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Jumlah VII Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		27.934.040.000,00	30.856.318.000,00	110,46	39.796.837.971,00
41	Total Pendapatan (I+VI+VII) JUMLAH PENDAPATAN (8 + 34 + 40)		857.866.416.646,00	853.163.494.742,85	99,46	859.876.910.606,12
42						
43	<b>BELANJA</b>	5.1.2				
44	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
45	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	207.642.914.715,00	204.587.347.426,79	98,97	251.426.351.894,00
46	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	290.064.190.556,00	285.515.339.808,63	98,47	297.220.066.943,80
47	Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Hibah	5.1.2.1.5	7.688.013.125,00	7.159.863.125,00	93,13	37.395.182.782,00
50	Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	436.700.000,00
51	Bantuan Keuangan	5.1.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah I Jumlah Belanja Operasi (45 s/d 51)		604.395.118.396,00	587.262.350.160,42	97,17	586.478.363.619,80
53						
54	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
55	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	1.079.479.000,00	646.850.383,00	78,45	220.970.397,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	56.839.920.770,00	50.764.208.530,00	89,28	40.494.356.562,00
57	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	34.069.490.186,00	33.560.396.816,94	98,51	38.599.654.196,00
58	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	47.403.222.772,00	46.393.195.382,00	97,87	45.323.460.059,00
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	29.088.647.560,00	2.933.762.720,00	10,09	3.295.819.512,00
60	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah II Jumlah Belanja Modal (55 s/d 60)		170.480.760.288,00	134.498.413.840,94	78,89	127.934.352.726,00
62						
63						
64						
65						
66	<b>TRANSFER</b>	5.1.3				
67	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA/DESA	5.1.3.1				
68	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	5.1.3.1.1	4.264.341.790,00	2.943.492.766,00	69,03	7.310.539.051,00
69	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota/Desa	5.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Bantuan Keuangan ke Desa (ADO dan DO)	5.1.3.1.4	122.766.426.676,00	122.604.270.340,00	99,87	114.099.769.800,00
72	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	5.1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	550.512.205,00
73	JUMLAH TRANSFER (70 s/d 74)		127.030.768.466,00	125.547.763.106,00	98,83	121.960.820.856,00
74	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (66 + 75)		905.431.647.190,00	850.529.068.508,38	93,94	869.716.236.309,80
75	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)		(17.446.230.504,00)	2.634.426.234,49	(15,19)	(9.639.326.303,68)
76	SURPLUS/DEFISIT (41 - 66)					

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbaharui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
79	<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.4				
80	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.1				
81	Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	21.445.230.504,00	21.445.230.504,00	100,00	35.790.184.541,00
82	Pencarian Dana Cadangan	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.4.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.4.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.1.4.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.1.4.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.1.4.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Penerimaan Kembali Investasi Proyek Pembangunan	5.1.4.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Penerimaan Kembali Investasi SUN dan SBI	5.1.4.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka	5.1.4.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.4.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Balanja	5.1.4.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Penerimaan Piutang Daerah	5.1.4.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
99	<b>Jumlah 1 Jumlah Penerimaan (81 s/d 98)</b>		<b>21.445.230.504,00</b>	<b>21.445.230.504,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.790.184.541,00</b>
100	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.2				
102	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.4.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.4.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.1.4.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.1.4.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.1.4.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Pembayaran Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.4.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Investasi SUN dan SBI	5.1.4.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investasi Proyek Pembangunan	5.1.4.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Pinjaman angsuran Berjangka	5.1.4.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Penyusunan Dana Besar/	5.1.4.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Balanja	5.1.4.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
118	<b>Jumlah 2 Jumlah Pengeluaran (102 s/d 117)</b>		<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
119	<b>PEMBIAYAAN NETTO (89 - 118)</b>	5.1.4.3	<b>17.445.230.504,00</b>	<b>17.445.230.504,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.790.184.541,00</b>
120						
121	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	5.1.5	<b>0,00</b>	<b>20.079.856.736,48</b>		<b>20.950.856.237,32</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



**NEGERI  
JAKARTA**

## Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022



## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1						
2	PENDAPATAN	5.1.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	75.133.613.277,00	56.405.483.719,00	75,07	26.512.304.152,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	8.082.037.800,00	6.030.954.433,00	74,62	3.483.522.178,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.992.039.925,00	3.992.039.925,00	100,00	3.459.548.137,00
7	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	78.946.617.209,00	80.008.156.518,82	101,34	54.940.349.810,85
8	Jumlah I Jumlah Pendapatan Asli Daerah		166.154.308.211,00	146.436.634.595,82	88,13	87.395.724.277,85
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	17.040.548.826,00	16.967.610.053,00	99,57	21.810.399.515,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	40.391.820.069,00	52.837.895.526,00	130,81	21.133.103.078,00
14	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	374.284.147.000,00	373.679.260.930,00	99,84	373.720.523.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	187.904.910.740,00	178.523.084.311,00	95,01	153.840.819.890,00
16	Jumlah II Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		619.621.426.635,00	622.007.890.820,00	100,39	670.504.845.486,00
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
19	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian (DID dan DD)	5.1.1.2.2.2	83.938.494.000,00	83.938.494.000,00	100,00	117.280.115.100,00
21	Jumlah III Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		83.938.494.000,00	83.938.494.000,00	100,00	117.280.115.100,00
22						
23	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.1.2.3				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.2.3.1	53.466.149.053,00	56.661.186.915,00	105,98	47.148.491.879,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah IV Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan		53.466.149.053,00	56.661.186.915,00	105,98	47.148.491.879,00
28						
29	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI - LAINNYA	5.1.1.2.4				
30	Bantuan Keuangan dari Propinsi	5.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi	5.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi	5.1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah V Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah VI (II+III+IV+V) Jumlah Pendapatan Transfer		757.026.069.684,00	762.607.531.735,00	100,74	734.911.452.465,00
35						
36	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
37	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	3.375.000.000,00	3.854.000.000,00	114,19	30.856.318.000,00
38	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Jumlah VII Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		3.375.000.000,00	3.854.000.000,00	114,19	30.856.318.000,00
41	Total Pendapatan (I+VI+VII) JUMLAH PENDAPATAN (8 + 34 + 40)		926.555.377.895,00	912.898.166.330,82	98,53	853.163.494.742,85
42						
43	BELANJA	5.1.2				
44	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
45	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	320.278.946.174,00	299.114.239.376,00	93,39	294.587.347.426,79
46	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	292.967.050.278,49	280.713.172.441,23	95,82	285.515.339.605,63
47	Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Subsidi	5.1.2.1.4	700.000.000,00	699.355.000,00	99,91	0,00
49	Hibah	5.1.2.1.5	7.400.091.125,00	13.512.821.725,00	182,60	7.159.663.125,00
50	Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Bantuan Keuangan	5.1.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah I Jumlah Belanja Operasi (45 s/d 51)		621.346.087.578,49	594.038.588.542,23	95,61	587.262.350.160,42
53						
54	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
55	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	7.956.508.800,00	6.846.222.672,00	86,05	846.850.383,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	36.898.023.392,00	38.323.448.520,00	103,86	50.784.208.539,00
57	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	73.132.215.678,00	72.252.644.819,00	98,80	33.560.306.816,94
58	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	62.137.230.437,00	61.750.802.875,00	99,38	48.383.195.382,00
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	6.982.468.100,00	2.618.067.439,00	37,52	2.933.762.720,00
60	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah II Jumlah Belanja Modal (55 s/d 60)		187.106.446.407,00	181.792.986.326,00	97,16	134.488.413.849,94
62						
63	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
64	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	3.127.500.000,00	2.535.778.000,00	81,08	3.220.541.401,00
65	Jumlah III Jumlah Belanja Tak Terduga (64)		3.127.500.000,00	2.535.778.000,00	81,08	3.220.541.401,00
66	Total Belanja (I+II+III) JUMLAH BELANJA (52 + 61 + 65)		811.580.033.985,49	778.368.352.867,23	95,91	724.981.305.402,36
67						
68	TRANSFER	5.1.3				
69	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/DESA	5.1.3.1				
70	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	5.1.3.1.1	8.376.626.948,00	4.676.632.515,00	55,83	2.943.492.766,00
71	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota/Desa	5.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Bantuan Keuangan ke Desa (ADO dan DID)	5.1.3.1.4	121.303.373.700,00	121.303.423.700,00	100,00	122.604.270.340,00
74	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	5.1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
75	JUMLAH TRANSFER (70 s/d 74)		129.680.000.648,00	125.980.056.215,00	97,15	125.547.763.105,00
76	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (66 + 75)		941.260.034.633,49	904.348.409.082,23	96,08	850.529.068.508,36
77	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)		(14.704.656.738,49)	8.549.757.248,59	(58,14)	2.634.426.234,49
78	SURPLUS/DEFISIT (41 - 66)					

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbaharui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
79	PEMBIAYAAN	514				
80	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	514.1				
81	Penggunaan SILPA	514.1.1	20,079,656,738.49	20,079,656,738.49	100.00	21,446,230,504.00
82	Pencetakan Dana Cadangan	514.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Haji Penjualan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan	514.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	514.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	514.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	514.1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	514.1.7	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	514.1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
89	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	514.1.9	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	514.1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
91	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	514.1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	514.1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Penerimaan Kembali Investasi Proyek Pembangunan	514.1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
94	Penerimaan Kembali Investasi SUN dan SBI	514.1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka	514.1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	514.1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
97	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)Utang Belanja	514.1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Penerimaan Piutang Daerah	514.1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Jumlah I Jumlah Penerimaan (81 s/d 98)		20,079,656,738.49	20,079,656,738.49	100.00	21,446,230,504.00
100						
101	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	514.2				
102	Pembentukan Dana Cadangan	514.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
103	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	514.2.2	5,375,000,000.00	5,375,000,000.00	100.00	4,000,000,000.00
104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	514.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	514.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	514.2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	514.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	514.2.7	0.00	0.00	0.00	0.00
109	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	514.2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	514.2.9	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	514.2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	514.2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Investasi SUN dan SBI	514.2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Investasi Proyek Pembangunan	514.2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Pinjaman angsuran Berjangka	514.2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Penyaluran Dana Bergulir	514.2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
117	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)Utang Belanja	514.2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Jumlah II Jumlah Pengeluaran (102 s/d 117)		5,375,000,000.00	5,375,000,000.00	100.00	4,000,000,000.00
119	PEMBIAYAAN NETTO (99 - 118)	514.3	14,704,656,738.49	14,704,656,738.49	100.00	17,446,230,504.00
120						
121	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	515	0.00	23,254,413,987.08		20,079,656,738.49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan secara keseluruhan



Tanjung, Mei 2023  
 BUPATI LOMBOK UTARA  
  
 H. DJOHAN SJAMSU, S.H.

# NEGERI JAKARTA